

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam menganalisis pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sesuai dengan data yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Sukoharjo di tahun 2020 menyebabkan terjadinya tujuh kali perubahan Perbup APBD dan empat kali perubahan Perda APBD atas APBD Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2020. Berdasarkan perubahan terakhir sebagaimana dalam Perbup Nomor 56 Tahun 2020, besaran anggaran belanja yang dihasilkan menunjukkan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan anggaran belanja sebesar 0,07%. Namun, di sisi lain struktur APBD yang disajikan masih berdasarkan ketentuan yang lama berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dikarenakan belum dikeluarkannya ketentuan teknis terkait PP Nomor 12 Tahun 2019 yang berlaku di tahun 2020.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 pada pos Belanja secara umum sudah sesuai dengan yang tercantum dalam PSAP 02.

Dari sisi penyajian laporan, penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 dilakukan melalui proses konversi karena adanya perbedaan struktur dalam APBD menurut ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 3,66%, sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 2,72%.

- 3) Pengukuran rasio kinerja belanja pemerintah secara umum dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran belanjanya. Dalam hal ini, pengakuan dan pengukuran belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas pengakuan dan pengukuran belanja tersebut, dihasilkan nilai realisasi belanja yang akuntabel yang berguna dalam perhitungan analisis kinerja belanja daerah. Berdasarkan analisis kinerja belanja daerah sebagaimana dalam Mahmudi (2019), diperoleh hasil sebagai berikut.
 - a. Varians belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 menunjukkan hasil yang negatif (*favorable*) yang mengindikasikan bahwa kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 berdasarkan analisis varians belanja dikategorikan baik karena tidak ada realisasi belanja yang melebihi anggarannya. Namun, varians Belanja Tak Terduga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan sehingga mengindikasikan adanya kelemahan dalam

perencanaan Belanja Tak Terduga meskipun termasuk dalam kategori *favorable*.

- b. Pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 mengalami penurunan 2,72%. Dalam hal ini, Belanja Operasi dan Belanja Modal mengalami penurunan, sedangkan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan.
 - c. Berdasarkan Rasio Keserasian Belanja, rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2019-2020 menunjukkan porsi yang cukup besar yakni sekitar 80%. Namun, rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja hanya berkisar belasan persen. Sedangkan, Belanja Tak Terduga yang mempunyai porsi paling kecil, pada tahun 2020 mengalami kenaikan rasio sebesar 57727,57%.
 - d. Berdasarkan kriteria Rasio Efisiensi Belanja menurut Mahsun (2012), Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinilai telah melakukan efisiensi anggaran mengingat secara keseluruhan realisasi belanja lebih kecil dibanding anggarannya. Akan tetapi, jika ditinjau berdasarkan efisiensi dari setiap jenis belanja, Rasio Efisiensi atas Belanja Tak Terduga tergolong sangat rendah karena hanya sebesar 35,24%. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut kurang efisien meskipun persentasenya kurang dari 100% karena dinilai kurang bisa memaksimalkan anggaran.
- 4) Permasalahan utama yang dialami Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam merealisasikan anggaran belanja tahun 2020 bukan ketika proses realisasinya, melainkan lebih ke proses penyusunan anggarannya. Hal ini dikarenakan

adanya perubahan APBD berkali-kali untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di samping tetap berusaha mewujudkan tercapainya sasaran strategis tahun 2020.